

ISSN: 2087-4650

TAJDID

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

KONTRIBUSI 'AISYIYAH DALAM GERAKAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Afni Rasyid

ORMAS ISLAM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:
PENGALAMAN MUHAMMADIYAH

Abdul Mu'ti

PEMBERDAYAAN KAUM TERTINDAS: PERAN
AGAMA DAN NEGARA

Rifma Ghulam Dzaljad

PERSEPSI WARGA JAKARTA TERHADAP
MUHAMMADIYAH

Subhan El Hafiz, Ilham Mundzir, Yulmaida Amir, Anisia Kumala

GAGASAN-GAGASAN PEMBARUAN SEPUTAR
METODE PENAFSIRAN AL-QUR'AN DI INDONESIA

Izza Rohman

KORUPSI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN
DAN PENTINGNYA PENGUATAN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI

Nur Achmad



TAJDID

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

“Berilmu Amaliah – Beramal Ilmiah”



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

TAJDID

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

"Berilmu Amaliah – Beramal Ilmiah"

Vol. II, No. 1, Juli-Desember 2011

Pembina

Sukardi

Penanggung Jawab

Afni Rasyid

Mitra Bestari

M. Din Syamsuddin

M. Yunan Yusuf

Amri Marzali

Suyatno

Pemimpin Redaksi

Izza Rohman

Redaktur Pelaksana

Muhib Rosyidi

Alamat Redaksi:

Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Telp: 021 8400341, 8604363, Fax: 021 86603233

TAJDID

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

"Berilmu Amaliah – Beramal Ilmiah"

Vol. II, No. 1, Juli-Desember 2011

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	1-4
Kontribusi 'Aisyiyah dalam Gerakan Pemberdayaan Perempuan Afni Rasyid	5-36
Ormas Islam dan Pemberdayaan Masyarakat: Pengalaman Muhammadiyah Abdul Mu'ti	37-53
Pemberdayaan Kaum Tertindas: Peran Agama dan Negara Rifma Ghulam Dzaljad	54-80
Persepsi Warga Jakarta terhadap Muhammadiyah Subhan El Hafiz, Ilham Mundzir, Yulmaida Amir dan Anisia Kumala	81-108
Gagasan-Gagasan Pembaruan Seputar Metode Penafsiran al-Qur'an di Indonesia Izza Rohman	109-150

Korupsi dalam Tinjauan al-Qur'an dan Pentingnya
Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Nur Achmad

151-174

Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif
Sunnah

Muhib Rosyidi

175-198

PEMBERDAYAAN KAUM TERTINDAS: PERAN NEGARA DAN AGAMA

Rifma Ghulam Dzaljad

Abstract

This essay figures out the relationship between paradigms of poverty and community empowerment, examines some notions and practices of empowerment in Indonesia, and looks at how a sort of Islamic liberative theology might inspire future practices and movements in the country. In doing so, the author highlights the important role that the state has to play in employing pro-empowerment policies, the centrality of the community itself in due empowerment, and some examples of religion being a driving force behind empowerment activities.

Keywords: *empowerment, paradigms of poverty, state, Islamic liberation theology.*

Abstrak

Tulisan ini mengurai hubungan antara paradigma kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, membahas berbagai gagasan dan praktik pemberdayaan di Indonesia, dan menilik bagaimana teologi pembebasan Islam bisa menginspirasi berbagai praktik dan gerakan di Indonesia ke depan. Dalam hal ini, penulis juga menyoroti peran penting yang perlu negara

mainkan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro-pemberdayaan, peran masyarakat dalam pemberdayaan yang baik, dan beberapa contoh bagaimana agama menjadi kekuatan pendorong upaya-upaya pemberdayaan.

Kata kunci: *pemberdayaan, paradigma kemiskinan, negara, teologi pembebasan Islam.*

Pendahuluan

Pemberdayaan (*empowerment*) bisa diartikan sebagai upaya partisipatif memberikan kemampuan kepada orang yang lemah—tidak saja kemampuan ekonomi, tetapi juga kemampuan lain yang bisa membuat orang lain berdaya, seperti secara politik, sosial, budaya, dan agama. Menurut DuBois dan Miley (Suharto 2006, 1), pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses maupun hasil. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas atau kemampuan personal, interpersonal atau politik sehingga individu, keluarga atau masyarakat mampu melakukan tindakan guna memperbaiki situasi-situasi yang memengaruhi kehidupannya. Sementara sebagai hasil, pemberdayaan menunjuk pada tercapainya sebuah keadaan, yakni keberdayaan atau keberkuasaan yang mencakup: a) *state of mind*, seperti perasaan berharga dan mampu mengontrol kehidupan; dan b) *reallocation of power* yang dihasilkan dari pemodifikasian struktur sosial. Dengan demikian, pemberdayaan mencakup tidak hanya peningkatan kemampuan seseorang atau sekelompok orang, tetapi juga perubahan sistem dan struktur sosial. Pemberdayaan tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan dalam bidang ekonomi (meningkatnya pendapatan), tetapi juga kemampuan dalam sosial-politik (misalnya untuk menyatakan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta menjangkau sumber-sumber kemasyarakatan dan pelayanan sosial).

Ide tentang pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pergeseran paradigma dalam melihat kemiskinan. Jika sebelumnya kemiskinan dilihat secara individual dan kultural berwajah *blaming the victim*, kini bergeser ke perspektif institusional dan struktural yang bermuka *blaming the system* (Parsons, Jorgensen dan Hernandez 1994). Adanya masyarakat yang lemah dan miskin (duafa) dipandang bukan akibat kesalahan individu bersangkutan yang malas, tidak mau bekerja, atau tidak memiliki etos usaha. Mereka itu menjadi miskin dan tidak berdaya (*mustadh'afin*) karena sistem sosial yang tidak pas, tidak adil, dan bahkan menindas. Mereka miskin bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena tidak ada pekerjaan. Mereka dimiskinkan oleh sistem yang tidak memberikan proteksi dan kesempatan kepada kelompok-kelompok kecil, masyarakat perdesaan atau masyarakat perkotaan yang dimarginalkan.

Di Indonesia, diskursus tentang pemberdayaan mulai kian populer pada awal 1990-an ketika pendekatan yang bersifat karikatif tidak dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan. Menurut Suharto dalam bukunya, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (2005), yang mendorong lahirnya sebuah pemberdayaan adalah faktor kemiskinan. Terjadinya kemiskinan massal di negeri ini akhirnya melahirkan gerakan sosial yang berupaya keluar dari masalah tersebut. Namun, gerakan pemberdayaan bukanlah sekadar lewat bantuan ekonomi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Raskin, Askeskin atau Jamkesmas, namun juga perlu mencakup dibangkitkannya kesadaran masyarakat akan potensi dan kemampuan mereka untuk berdaya.

Tulisan ini akan melihat hubungan pemberdayaan dengan berbagai paradigma dalam memandang kemiskinan, beberapa gagasan pemberdayaan—termasuk pemberdayaan oleh negara—yang berkembang di Indonesia, dan beberapa inspirasi dari ajaran dan sejarah Islam untuk mendorong pemberdayaan

di Indonesia—negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.

Urgensi Pemberdayaan

Amanat UUD 1945 menekankan kewajiban negara untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, dan adalah tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negaranya. Salah satu tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu terkait dengan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh negara.

UNDP dalam dokumen, “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan” (1997) menyebutkan bahwa: ciri-ciri tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Kedua dokumen penting tersebut ternyata belum juga diiringi oleh suatu perwujudan kebijakan yang memihak hak-hak sipil warga negara. Warga negara yang miskin tetap menjadi “warga negara asing” atau, meminjam istilah Emha Ainun Nadjib, “gelandangan di negeri sendiri”. Negara lebih berharap investasi asing masuk, ketimbang mendorong pertumbuhan ekonomi mikro pedagang kecil menengah. Pemerintah lebih memilih mengorbankan rakyat kecil atas nama pembangunan (misalnya dalam kasus penggusuran pedagang kaki lima di beberapa kota besar) daripada memaksa investor asing keluar dari Indonesia, meski nyatanya banyak pusat perdagangan

melanggar peruntukan tempat usaha dan melakukan praktik dagang yang menghancurkan pasar tradisional, dan perusahaan-perusahaan penambang logam dan minyak merugikan bangsa ini dengan kontrak karya yang tak memberi manfaat optimal, merusak serta mencemari ekosistem dan mata rantai kehidupan suku-suku maupun penduduk lokal setempat, serta mengeruk sumber daya alam kita secara membabi-buta. Demikian halnya dengan politik negara atas kebijakan pertanian yang sarat dengan praktik dumping dan monopoli, sehingga hanya memberi “ruang bermain” pada sekelompok pengusaha. Sementara, kenaikan harga kebutuhan pokok, dari beras, gula, minyak, terigu, hingga kedelai terus mencekik kehidupan rakyat bawah. Pada sisi lain, tidak pernah ada upaya signifikan dari negara untuk melindungi, apalagi berusaha membangkitkan pertanian kita yang terus terpuruk dan dilindas “*juggernaut*” ekonomi pertanian global.

Berdasarkan kenyataan ini, pemberdayaan terhadap masyarakat lemah, kaum duafa dan *mustadh'afin* mutlak perlu dilakukan.

Teorisasi di Balik Diskursus Pemberdayaan

Cara pandang kita dalam melihat pemberdayaan akan menentukan cara kita menyelesaikan berbagai problem sosial. Mengurai konsepsi pemberdayaan sama rumitnya dengan mengurai masalah kemiskinan itu sendiri. Karena itu, kaitan antara pemberdayaan dengan problem kemiskinan—dan paradigma kemiskinan—tidak dapat dipisahkan. Keduanya erat terkait.

Secara umum, pemberdayaan dapat dilihat berdasarkan cara pandang (paradigma) kita terhadap masalah kemiskinan. Dalam hal ini terdapat tiga paradigma besar, yaitu paradigma pembangunan, paradigma mutual, dan paradigma kritis.

Dalam paradigma pembangunan, pemberdayaan dilihat hanya sebagai obat, dan kemiskinan dilihat bukan berasal dari

struktur sosial, melainkan berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Para pendukung paradigma ini melihat bahwa mereka miskin dan melarat disebabkan adanya budaya kemiskinan. Karena itu, agar mereka tidak miskin, maka diberilah “obat” pemberdayaan, baik dalam bentuk pinjaman modal maupun pendampingan dan pelatihan. Paradigma obat ini tidak dapat dilepaskan dari perspektif kalangan ini yang lebih berpijak pada landasan teori pembangunan (*developmentalisme*).

Teori pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial, sesungguhnya banyak menekankan pada beberapa konsep yang hampir sepadan maknanya, seperti pertumbuhan, *progress* dan modernisasi. Konteks pembangunan, pertumbuhan, *progress* maupun modernisasi dalam praktiknya menjadi suatu kategorisasi yang lebih dekat dengan penguasa. Tidaklah mengherankan bila teori *developmentalisme* menjadi agenda besar sekaligus arus utama yang begitu kuat menyihir kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Teori ini muncul pada 1950-an di Amerika Serikat sebagai respon kaum intelektual terhadap Perang Dunia II dan ketegangan akibat perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berpengaruh terhadap kecenderungan negara-negara Asia-Afrika kepada sosialisme. Teori pembangunan dan teori modernisasi dianggap memiliki kesamaan dalam landasan teoretisnya karena bertumpu pada teori ekonomi klasik, teori evolusionisme, serta teori fungsionalisme (Fakih 2002, 45).

Dalam hal ekonomi, teori pembangunan dan modernisasi bersandar pada ekonomi yang dibangun di atas landasan ekonomi kapitalisme. Pandangan ini bersumber pada ekonomi klasik Adam Smith (1776) dengan karyanya, *The Wealth of Nation*, termasuk pemikiran David Ricardo, James Mill, Jeremy Bentham, Robert Malthus, dan J.B. Say yang mendasarkan pada filsafat liberalisme. Para pemikir ini percaya pada kebebasan individu (*personal liberty*), pemilikan pribadi

(*private property*), dan inisiatif individu, serta usaha swasta (*private enterprise*). Beberapa pandangan ekonomi liberal ini memengaruhi teori perubahan sosial, yaitu: *Pertama*, para pemikir ekonomi klasik ini percaya pada *laissez-faire*, yakni kepercayaan akan kebebasan dalam bidang ekonomi yang memberi isyarat perlunya membatasi atau memberi peranan sangat minimum kepada pemerintah dalam bidang ekonomi. *Kedua*, mereka percaya kepada ekonomi pasar yang diletakkan di atas sistem persaingan bebas dan kompetisi sempurna. *Ketiga*, mereka percaya kepada kondisi *full employment*, yakni suatu kepercayaan bahwa ekonomi akan berjalan lancar dan selalu mengalami penyesuaian diri jika tanpa intervensi pemerintah. *Keempat*, mereka mendasarkan pada *harmony of interest*, yaitu percaya bahwa memenuhi kepentingan individu berarti memenuhi kepentingan masyarakat. *Kelima*, mereka menitikberatkan pada kegiatan ekonomi, khususnya industri. *Keenam*, mereka percaya bahwa hukum ekonomi berlaku universal. *Ketujuh*, para pemikir ini memfokuskan pemikirannya pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. *Kedelapan*, mereka percaya pada hukum pasar, yakni *supply creates its own demand* (Fakih 2002, 47).

Selain landasan teoretis di atas, terdapat beberapa pemikiran (variasi teoretis) dari teori pembangunan dan modernisasi, yaitu: *pertama*, teori pertumbuhan ekonomi W.W. Rostow. Dalam bukunya, *The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto*, Rostow lebih fokus pada faktor manusia—bukan struktur dan sistem—untuk merencanakan perubahan sosial, sebagaimana metafora pertumbuhan organisme. Rostow ingin menangkalkan sosialisme dengan mengajukan tawaran berupa lima tahapan pembangunan untuk dapat mencapai perwujudan negara modern, yaitu: 1) tahap masyarakat tradisional, 2) tahap prakondisi tinggal landas, 3) tahap masyarakat tinggal landas, 4) tahap masyarakat

pematangan dan pertumbuhan, dan 5) tahap masyarakat modern yang dicita-citakan.

Dalam teorinya, Rostow melihat bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat industri yang mempunyai konsumsi massa tinggi (*high mass consumption*), suatu masyarakat yang diukur berdasarkan seberapa besar modal tersedia. Dalam praktiknya, Rostow menawarkan upaya penggalan modal dengan cara penggalan investasi, yakni melalui: pemindahan sumber dana (kebijakan pajak); lembaga-lembaga keuangan (obligasi pemerintah); devisa dari perdagangan internasional; serta penarikan investasi modal asing. Alih-alih dapat memberikan terwujudnya masyarakat modern, teori Rostow yang diterapkan Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto justru menjadikan Indonesia terpuruk dalam kesenjangan yang lebih lebar menganga, kemiskinan yang semakin bertambah, dan krisis ekonomi yang luar biasa dahsyatnya.

Selain pemikiran Rostow, terdapat variasi teoretis dari David McClelland dalam bukunya, *The Achievement Motive in Economic Growth* (1984), yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan baik bila *the need for achievement* (N_{ach})-nya tinggi, demikian sebaliknya. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh semangat Protestan yang mampu menghadirkan kapitalisme di Barat, sebagaimana diungkap Max Weber. Kemudian varian teoretis lain dari Mahbub ul-Haq tentang kebutuhan dasar (*basic needs*). Varian teori ini melihat pentingnya strategi langsung pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan dan partisipasi.

Dengan bersandar pada tiga varian teoretis di atas, sesungguhnya teori ini hanya bertumpu pada pola *top-down*. Pola pembangunan dan modernisasi hanya dianggap berhasil bila *trickle down effect* betul-betul memberikan pemerataan

kepada masyarakat. Karenanya, kita melihat dalam konteks pemberdayaan pemerintahan sejak Orde Baru hingga sekarang cenderung sekadar menerapkan adanya subsidi BBM, pinjaman atau hibah dalam bentuk IDT dan Takesra pada masa Orba, kemudian hibah Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada masa Reformasi, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY. Alih-alih memberdayakan masyarakat bawah, faktanya pola yang demikian lebih sering berkubang dalam kekuasaan yang korup dan mentalitas pemalas, ketimbang meneteskan kemakmuran secara merata dan berdaya guna untuk masyarakat.

Berbeda dengan paradigma pembangunan, *paradigma mutual* lebih melihat hubungan kausalitas yang terjadi. Artinya, para pemikir dari kalangan ini melihat bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Bagi mereka, bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka dimungkinkan kemiskinan dapat ditekan sekecil-kecilnya. Masyarakat akan dapat dientaskan dari kemiskinan sebagaimana layaknya masyarakat yang lain. Menurut pemikir paradigma ini, akar permasalahan mengapa mereka miskin adalah akibat kesenjangan, ketidakadilan, dan perlakuan yang tidak merata secara ekonomi.

Pemikiran ini dipengaruhi oleh pijakan teoretis yang cenderung menyandarkan pada teori ketergantungan (*dependensi*). Teori ini dilatarbelakangi oleh situasi kemacetan ekonomi negara-negara Amerika Latin, serta keragu-raguan mereka terhadap teori pembangunan. *Pertama*, Celco Furtado menjelaskan adanya *center* (pusat) dan *periphery* (pinggir) sebagai ciri *dependensi*. Menurutnya, terdapat struktur internal yang diwariskan kolonial (negara maju/*center*) terhadap negara berkembang (*periphery*), sehingga negara berkembang selalu bergantung pada negara maju. Dalam bukunya, *Economic Development of Latin America* (1969), Furtado mengusulkan bila negara berkembang mau maju, maka negara berkembang

harus mandiri, yaitu berjuang merestrukturisasi seluruh ekonomi, menyebarluaskan teknologi ke semua sektor produksi, menjamin pemerataan distribusi pendapatan, dan mengakhiri proses marginalisasi masyarakat.

Kedua, Fernando Cardoso dan Enzo Faletto dalam buku penelitiannya, *Dependency and Development in Latin America* (1969), mengatakan, pembangunan ekonomi merupakan campuran berbagai interes kelas dari waktu ke waktu, yang secara historis berubah, meski dalam faktanya menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap pasar dunia. Menurut Cardoso dan Faletto, setelah merdeka, kekuasaan politik dibiarkan oleh aliansi kekuasaan politik modern dan komersialisasi ekonomi yang muaranya memungkinkan terjadinya monopoli yang tergantung atau dalam istilah Paul Baran dan Paul Sweezy disebut *monopoly capitalism*. Pemikiran tersebut dikuatkan oleh analisis Andre Gunder Frank yang melihat bahwa sistem kapitalisme dunia ditandai oleh struktur *metropolis-satelit*, di mana *metropolis* selalu mengeksploitasi *satelit*.

Ketiga, Theotonio dos Santos berusaha menganalisis adanya tiga bentuk ketergantungan, yaitu 1) ketergantungan kolonial yang ditandai oleh monopoli perdagangan yang dilengkapi dengan monopoli tanah, tambang dan tenaga kerja di negara jajahan, 2) ketergantungan *financial-industry*, yakni ketergantungan negara berkembang terhadap konsentrasi kapital (modal), dan 3) ketergantungan *technological-industry*, yang ditandai pendirian perusahaan multinasional di negara yang bergantung. Dos Santos belakangan melihat ada saling hubungan antara *center* dan *periphery*. Menurutnya *periphery* tidak lagi marginal, melainkan telah menjadi bagian dari sistem imperialis itu sendiri. Teori *dependensi* adalah relasi imperialisme internal dari negara-negara berkembang, dalam hal ini Amerika Latin.

Ketiga pemikiran dari teori dependensi di atas, menurut Sanjaya Lall (1975) dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: 1) dependensi dipercaya selalu membawa kemiskinan, 2) pertumbuhan selalu dibatasi oleh terbatasnya pasar, 3) pertumbuhan itu mungkin, tetapi akan selalu menjadi subordinat dari *center*. Faktanya kemiskinan dan keterbelakangan menjadi isu utama yang memungkinkan negara-negara maju semakin leluasa “mendikte dan menggantung” negara-negara berkembang dengan berbagai pinjaman lunak (hibah) yang mereka berikan.

Karena itu, pemberdayaan yang terjadi selama ini lebih dilihat dari sudut pandang adanya kebutuhan kelompok kuat, baik pemerintah, pengusaha maupun mereka yang secara ekonomi lebih kuat. Pemberdayaan diterapkan sekadar sebagai “ritual” agar kelihatan ada kepedulian dan tidak timbul resistensi dari masyarakat bawah. Faktanya, pemberdayaan hanya sesaat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat bawah, tetapi tidak mengubah peta kekuatan ekonomi masyarakat.

Bagi pendukung *paradigma kritis*, kesenjangan dan kemiskinan terjadi akibat adanya struktur sosial, ekonomi, politik yang melestarikan kondisi tersebut. Seseorang menjadi miskin bukan karena sebuah pilihan rasional dan efek kemalasan (budaya), melainkan lebih disebabkan adanya eksploitasi oleh kelompok elite, kelas kapitalis ataupun penguasa yang tidak memihak rakyatnya.

Paradigma ini melihat akar masalah kemiskinan dari perspektif teori kritis. Analisis dan pendekatan teorinya berpijak pada pemikiran Marxis, Mazhab Frankfurt (Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse), Louis Althusser, Antonio Gramsci maupun Michel Foucault. Menurut Stephen Leonard dalam bukunya, *Critical Theory in Political Practice* (1990), pemikiran yang ingin dikembangkan lewat teori kritis adalah suatu teori alternatif yang berdimensi *praxis* dan mengarahkan suatu aksi perubahan sosial yang memberikan

kritik terhadap institusi dan praktik sosial politik yang tidak adil yang ada di masyarakat. *Praxis* dari teori kritis adalah pembebasan dari segala bentuk struktur sosial politik ekonomi yang menindas, korup, otoriter, memonopoli, dan membelenggu kebebasan rakyat.

Pertama, pemikiran teori kritis berpijak pada kritik Marx atas kapitalisme yang dianggapnya tidak pernah memberikan nilai surplus (*surplus value*) kepada buruh. Kapitalisme menjadikan moda produksi hanya berpusat di tangan pemilik modal saja. Akibatnya terjadi relasi sosial yang tidak berimbang, timpang dan bahkan menindas. Karena itu, Marx menawarkan revolusi proletariat yang memungkinkan terciptanya persamaan struktur sosial masyarakat.

Kedua, pemikiran Gustavo Gutierrez (1973) tentang teologi pembebasan dapat disebut sebagai bentuk teori kritis yang berusaha menyingkap nilai kebenaran yang disembunyikan otoritas agama. Kemiskinan dan penindasan menjadi sesuatu yang lumrah dalam bahasa otoritas Katolik. Padahal, sejatinya teologi Kristiani, menurut Gutierrez—bila direfleksikan dengan realitas sosial—mestinya memberi jaminan bagi hilangnya kemiskinan dan penindasan di masyarakat, sebagaimana yang diajarkan Yesus. Karena itu, perlu adanya revolusi kehendak dalam wujud teologi pembebasan, suatu teologi yang menghindari formulasi yang menipu dan otoritas yang membelenggu, dalam hal ini negara dan otoritas agama.

Ketiga, teori kritis juga berpijak pada pemikiran Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan, di mana Foucault melihat bahwa akar penindasan dan penguasaan adalah dominasi terhadap suatu diskursus. Negara-negara maju dapat begitu leluasa mendikte negara-negara berkembang karena mereka memiliki dominasi yang kuat dalam terminologi dan diskursus. Teori pembangunan, *women in development*, demokrasi dan *civil society*, *human rights*, *good governance* dan *clean government*, serta terorisme menjadi diskursus yang

efektif menekan sekaligus mengontrol dimensi politik, sosial dan ekonomi negara-negara berkembang. Untuk keluar dari dominasi kekuasaan negara-negara maju, maka negara-negara berkembang harus berupaya membangun diskursus sendiri, yang bebas dan memberikan kekuasaan bagi negara-negara berkembang.

Ketiga tawaran teori kritis di atas berupaya membawa praktik pembebasan. Teori kritis berusaha menjelaskan bagaimana keadaan sistem sosial yang ada telah menciptakan suatu bentuk pemahaman dan kesadaran palsu tentang realitas sosial. Itu berarti teori kritis berkepentingan membangkitkan kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas sosial yang dihadapi, serta memfasilitasi lahirnya visi alternatif tentang relasi sosial yang bebas dari segala bentuk penindasan, eksploitasi dan ketidakadilan.

Dalam paradigma ini, tawaran pemberdayaan dilihat sebagai upaya sistemik dari kekuasaan politik ekonomi sosial, kecuali bila model pemberdayaan lahir dari kesadaran sendiri masyarakat bawah, suatu kesadaran yang melahirkan model pemberdayaan yang berangkat dari kesederhanaan hidup ke arah kehidupan yang lebih beradab. Pemberdayaan model ini berhasil membangkitkan desa-desa kecil (unit-unit percontohan), tetapi tidak dapat menyebar dan menandingi hegemoni kuasa rezim politik ekonomi sosial. Pemberdayaan ini hanya menjadi cikal lahirnya tokoh-tokoh kecil yang berani hidup berbeda melawan arus zamannya.

Meredefinisi Pemberdayaan oleh Negara

Pemberdayaan adalah sebuah proses, dan keberhasilan proses ini bukan hanya karena paham terhadap pengetahuan dan keterampilan menyangkut pemberdayaan dan pembangunan, melainkan lebih karena seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat bisa memegang teguh komitmen dasar pemberdayaan yang bersandar pada prinsip

keadilan, kejujuran, profesionalisme, keterbukaan, kebersamaan dan kerjasama, kemitraan, dan menekankan pembelajaran dan keberlanjutan. Pemahaman ini searah dengan definisi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menurut CLAPP (2005), yang merupakan proses yang bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*), dari perubahan hubungan keberdayaan antara laki-laki dan perempuan, yang kaya dan yang miskin, serta antara masyarakat dan lembaga eksternal, sehingga kelompok yang kurang beruntung bisa lebih berdaya atau mempunyai kendali terhadap kehidupan mereka sendiri.

Namun demikian, dalam praktiknya di masyarakat, pemberdayaan lebih sering diartikan sebagai kegiatan belas kasihan, suatu upaya mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi akibat gagalnya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh negara, yang diperkirakan secara *top-down* akan meneteskan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat bawah (*trickle down effect*), ternyata justru menciptakan kantong-kantong baru kemiskinan, kelompok rentan, serta komunitas yang marginal dan terasing.

Pemberdayaan menjadi komoditas wacana dan berita sejak isu kemiskinan berkembang pesat pada akhir 1974 hingga sekarang. Pemberdayaan dipahami sebagai upaya mengentaskan masyarakat dari kemalasan, kemiskinan, dan kerentanan yang dialaminya. Pemberdayaan menjadi obat sekaligus merek dagang yang laris manis diperjualbelikan sebagai ikon pengentasan kaum miskin, kelompok rentan, ataupun mereka yang terpinggirkan akibat pembangunan. Pemberdayaan menjadi lahan subur, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat miskin sendiri. Akibatnya, pemberdayaan hanyalah sekadar urusan kecil dari persoalan besar yang menimpa bangsa, sekadar tambal sulam agar kelihatan bahwa Indonesia adalah benar-

benar negara kesejahteraan sebagaimana dipahami dalam konstitusinya.

Problem pemberdayaan yang demikian harus dipahami sebagai akibat kesalahan dalam memahami kemiskinan dan kecenderungan untuk memanipulasinya demi citra politik belaka. Dalam era otonomi daerah saat ini semestinya dipahami bahwa kebijakan atau program pemberdayaan akan dapat berhasil apabila orientasi pemberdayaan selalu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan. Menurut H.S. Dillon (2001) prinsip ini disebut dengan pendekatan *people-driven* (menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan “politik”). Bagi Dillon, “kaum miskin harus menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan, demikian juga pada hal lain.” Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai objek, tetapi sebagai subjek. “Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya” (Mubyarto 2001).

A.B. Susanto selaku Mitra Pelaksana Jakarta Consulting Group mengembangkan model pemberdayaan yang disebut sebagai DISCUSS (*Development, Involve, Socialize, Cater, Utilize, Sensitive dan Socialize*). Menurut Susanto, pemberdayaan dimulai dengan *development*, yaitu pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan sasaran program berdasarkan hasil *community-needs analysis*. Bersamaan dengan tahap ini adalah mengikutsertakan atau melibatkan peran komunitas/masyarakat (*involve*). Tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan (*socialize*) program kepada seluruh komunitas, agar mereka merasa memiliki sekaligus ikut bertanggung jawab. Kemudian memasuki tahap pelaksanaan,

terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: *cater*, yang berarti program-program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (dalam bahasa lain harus aspiratif), serta memperhatikan potensi atau kearifan lokal (*local wisdom*), dan *utilize*, yang berarti sedapat mungkin melibatkan tenaga masyarakat setempat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya harus dikembangkan kepekaan (*sensitive*) dalam memahami situasi psikologis, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir adalah *socialize*, dalam artian melakukan sosialisasi program atau *exposure* pada berbagai pihak pemangku kepentingan, sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, Korten (1988), Mubyarto (1984), Sajogyo (2000), dan Ismawan (1992) secara eksplisit percaya terhadap pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat dalam perencanaan program, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk mengenali permasalahan, potensi dan secara swadaya mencapai kemandirian dalam mengatasi pemasalahan mereka. Usaha produktif baik dalam bentuk *on-farm* maupun *off-farm* milik kelompok masyarakat akan mampu memberikan *multiplier effect* pada sektor lain, baik berupa peningkatan konsumsi maupun mengundang investasi pihak lain (terjadi pertumbuhan *output*). Artinya, pemberdayaan bukanlah masalah mengurus yang kecil, melainkan proses menghimpun titik-titik kecil kekuatan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, baik sebagai pemain maupun kekuatan politik ekonomi sosial baru dalam pembangunan.

Lebih lanjut, sebagai jaringan kerja, pemberdayaan harus dibentuk sebagai suatu kesatuan sistem yang berdasar pada kesetaraan hubungan antar pemangku kepentingan dan terdapat kesamaan dalam pencapaian tujuan. Ini sesuai dengan pemikiran Tilden bahwa dalam konteks pemberdayaan, ada empat hal yang mesti diperhatikan: pemecahan masalah, kepedulian terhadap

masyarakat, komitmen terhadap misi proyek, dan kejujuran kepada diri sendiri dan orang lain.

Dengan demikian, agar pemberdayaan benar-benar dapat mencapai target, sasaran dan tujuan yang diharapkan, ada beberapa upaya sistematis yang harus terintegrasi dalam suatu sistem yang terpadu dan berkelanjutan. *Pertama*, pemihakan melalui kebijakan negara. Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) berdasarkan konstitusi. Artinya, kebijakan negara harus mencerminkan keberpihakan dalam hal perlindungan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Tanpa campur tangan negara, seluruh proses pemberdayaan akan sia-sia. Sebab, para pemangku kepentingan bukan hanya menghadapi problem internal, melainkan juga digencet oleh kekuatan besar ekonomi korporasi transnasional, kapitalisasi modal dan dana global maupun kekuatan politik dunia pertama (negara-negara G7).

Pemihakan negara diperlukan agar ada jaminan untuk hidup dan berkembang bagi rakyat miskin, kelompok rentan, dan seluruh warga negara yang selama ini termarginalkan. Pemihakan tersebut dilakukan negara dengan membuat kebijakan menyangkut sistem kesejahteraan dan jaminan sosial yang bukan hanya mencukupi hak-hak dan kebutuhan dasar warga negara, melainkan juga memberikan proteksi, skema usaha dan kenyamanan bagi berkembangnya usaha petani dan masyarakat miskin. Intinya kebijakan negara harus terintegrasi sebagai kesatuan sistem yang benar-benar memihak masyarakat.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia merupakan hal paling esensial dalam menggerakkan pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mementingkan akumulasi modal fisik melainkan juga pembentukan modal manusia. Studi Schultz, Harbison, Denison, Kendrick, Moses Abromovitz, Becker, Kuznets, Jhingan (1988) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan

pertumbuhan cepat perekonomian Amerika adalah pembiayaan pendidikan yang secara relatif selalu meningkat. Demikian halnya dengan kemajuan Cina sebagai kekuatan ekonomi politik dunia belakangan ini pun tidak dapat dilepaskan dari perhatian yang tinggi dari negara terhadap kualitas manusia Cina, dan peningkatan kuantitas anggaran pendidikannya.

Peningkatan kapasitas manusia diperlukan, sebab pemberdayaan merupakan proses transfer nilai. Pemberdayaan adalah proyek pembangunan kebudayaan dan penciptaan sebuah peradaban. Di sini diharapkan dengan adanya pemberdayaan maka akan lahir manusia baru yang memiliki kesadaran, mandiri, kuasa atas zamannya, memegang teguh kearifan lokal, serta berpikir dan berbuat untuk kehidupan generasi berikut yang lebih baik dan beradab.

Ketiga, pembangunan kelembagaan. Pemberdayaan bukan hanya sekadar pendekatan metodologis dalam rangka memandirikan masyarakat sasaran, melainkan harus juga diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret sebagai bentuk dari pencapaian sebuah program. Ketika melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat miskin di suatu desa, maka pemberdayaan bukan hanya sekadar bagaimana melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan bersama mereka yang miskin, namun juga pada kurun waktu tertentu, harus ada monitoring dan evaluasi “sudah berapa anggota masyarakat desa tersebut yang berubah hidupnya menjadi tidak miskin atau tidak lagi menjadi tergantung.”

Orientasi pemberdayaan harus tertuju pada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan. Sebab, pemberdayaan bukan sekadar membangun individu, melainkan menata secara lebih baik sistem sosial ekonomi dan politik suatu masyarakat. Dengan itu pemberdayaan akan memiliki daya jangkauan yang menyebar luas dan menjadi satu sistem kebudayaan yang tahan lama di masyarakat.

Keempat, penyediaan fasilitas produksi, baik teknologi maupun modal usaha. Pemberdayaan haruslah secara nyata menyediakan berbagai alat, pengetahuan atas teknologi, serta penyertaan modal usaha. Sebab, pemberdayaan jika diterapkan sebagai sebuah program, ia haruslah bersifat praktis dan dapat dilakukan dengan mekanisme yang sederhana, cepat dan memberikan hasil. Karena itu, penyediaan berbagai alat dan teknologi, serta penyertaan modal usaha, haruslah diberikan dengan disertai pendampingan dan evaluasi yang tersistem. Sehingga, apa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dari masyarakat benar-benar nyata terjadi.

Keempat hal di atas penting sebab mereka yang diberdayakan itu memiliki keterbatasan struktural (Alexander 1993) atau ketidakberuntungan (Robert Chambers 1983) sebagai titik kelemahannya, yaitu: 1) keterbatasan pemilikan aset (*poor*); 2) kondisi fisik yang lemah (*physically weak*); 3) terisolasi (*isolated*); 4) rentan (*vulnerable*); dan 5) tak berdaya (*powerless*). Dengan adanya kebijakan yang memihak dari negara, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan kelembagaan, serta penyediaan fasilitas produksi, berupa teknologi dan modal usaha, diharapkan akan terjadi perubahan sosial, yang dalam jangka panjang akan membentuk masyarakat bangsa yang mandiri, memiliki daya tahan, dan dapat bersaing di kompetisi global.

Pemberdayaan Kaum Duafa dan *Mustadh'afin* dalam Islam

Agar pemberdayaan berlangsung secara berkelanjutan dan menuai hasil, peran agama dalam hal ini tidaklah semestinya diabaikan. Agama, yang menyediakan sumber justifikasi yang sangat kuat dan bisa menjadi kekuatan pendorong dan penggerak umat penganutnya, memiliki potensi besar untuk membuat pemberdayaan lebih bisa diterima, lebih bisa menjaring partisipasi aktif, dan lebih menjamin kesinambungan.

Dalam al-Qur'an, kata *teraniaya*, ditindas, dan lemah disebut berulang-ulang dengan beragam makna dan tujuan. Kata "*teraniaya*" terdapat dalam: al-Nisâ' [4]: 148 dan al-Syûrâ [42]: 41. Kata "*ditindas*" terdapat dalam: al-Nisâ' [4]: 97; al-A'râf [7]: 129, 137; Yûnus [10]: 90; dan al-Qashash [28]: 4-5. Adapun kata "*lemah*" dalam al-Qur'an terdapat dalam: al-Nisâ' [4]: 9, 28, 75, 76, 104, 117, 127; al-Baqarah [2]: 10, 282; Hûd [11]: 91; al-Rûm [30]: 54; Âl 'Imrân [3]: 123, 139, 146, 152, 159; Muḥammad [47]: 35; al-Aḥqâf [46]: 11; al-Mu'min [40]: 47; Shâd [38]: 34; Yâsîn [36]: 68; Saba' [34]: 31-33; Luqmân [31]: 14; al-A'râf [7]: 75, 150, 155, 194; al-'Ankabût [29]: 10, 41; al-Syu'arâ' [26]: 192; al-Hajj [22]: 73; Thâhâ [20]: 44; Maryam: 4, 75; al-Kahf [18]: 19; al-Nahl [16]: 70; Ibrâhîm [14]: 21; Yûsuf [12]: 94; al-Tawbah [9]: 60, 87, 91; al-Mâ'idah [5]: 54; al-Qalam [68]: 42; al-Jinn [72]: 24; al-Nâzi'ât [79]: 2; al-Munâfiqûn [63]: 8; dan al-Hâqqah [69]: 16.

Orang yang tertindas disebut al-Qur'an sebagai *mustadh'afin*, yakni kelompok manusia yang berada dalam status sosial "*inferior*", tersisih, dan tertindas secara sosio-ekonomi dan sering diperlakukan secara diskriminatif. Selain menggunakan kata ini untuk menyebut kaum tertindas, al-Qur'an juga memakai istilah lain untuk menunjuk kelas sosial yang rendah, seperti *arâdzîl* (yang tersisih), *fuqarâ'* (fakir), dan *masâkin* (orang-orang miskin).

Farid Esack (1997) mengatakan bahwa seseorang disebut *mustadh'afin* bila ada orang yang menjadi sebab penderitaan mereka. Seseorang hanya menjadi *mustadh'afin* akibat perilaku atau kebijakan pihak penguasa yang arogan.

Hasan Hanafi (1998) dalam refleksi teologisnya mengatakan bahwa kendati menurut ayat-ayat al-Qur'an kita ini merupakan umat yang satu (*ummatan wâḥidah*), namun sesungguhnya dalam kenyataan objektif kita dipisahkan menjadi dua, yaitu umat yang miskin dan umat yang kaya.

Gagasan “Islam Transformatif” Moeslim Abdurrahman patut dicatat di sini. Moeslim melihat ada tiga problem yang dialami orang-orang miskin dan tertindas (*duaafa* dan *mustadh’afin*) sehingga tersingkir dari mobilitas sosial. *Pertama*, kemiskinan agama sebagai rasionalisasi hidup. Agama yang sekarang menjadi arus utama tidak mampu menjadi kekuatan spiritual dan moralitas yang membela kaum *duaafa* dan *mustadh’afin*. Sebab, agama tidak menjadikan kaum *mustadh’afin* sebagai subjek, tetapi hanya sebagai konsumen agama. *Kedua*, kemiskinan institusi agama, seperti majelis taklim. Tidak ada lingkaran seperti majelis taklim yang menghimpun kaum *mustadh’afin*, untuk membicarakan nasib dan problem sehari-hari yang mereka alami. *Ketiga*, kemiskinan di bidang kelembagaan sosial ekonomi. Tidak ada upaya *regrouping* kaum *duaafa* dan *mustadh’afin* dalam komunitas ekonomi, yang dengannya mereka bisa memiliki kekuatan ekonomi.

Anggapan bahwa ada problem teologis Islam dalam pemberdayaan kaum *duaafa* dan *mustadh’afin* seperti dikemukakan Moeslim Abdurrahman di atas mungkin salah. Sebab, menurut Kuntowijoyo, dalam Islam keberpihakan terhadap kaum *duaafa* dan *mustadh’afin* sangat kuat. Islam memiliki spirit yang luar biasa dalam melakukan pemihakan dan pemberdayaan terhadap kaum *duaafa* dan *mustadh’afin*. Semangat dan kerja pembebasan dari perbudakan (penjajahan sesama manusia), pembelaan terhadap hak-hak minoritas (fakir miskin, kaum perempuan, kulit hitam, dan suku-suku badui), serta penekanan iman yang diukur berdasarkan kualitas amal saleh (kebajikan terhadap sesama) menjadi bukti pemihakan dan pemberdayaan Islam atas hal itu.

Nabi saw. selalu berpihak kepada orang-orang yang teraniaya (*mustadh’afin*). Al-Qur’an menyatakan bahwa bumi dipusakakan (diwariskan) kepada kaum tertindas di muka bumi. Allah berfirman, “Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah

ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya” (al-A’râf [7]: 137).

Dalam ayat lain Allah memerintahkan untuk menolong kaum tertindas, bahkan berperang demi membela mereka. “*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!’*” (al-Nisâ’ [4]: 75).

Selain itu, Allah Swt. menjanjikan karunia kepada kaum *mustadh’afin* dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. “*Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)*” (al-Qashash [28]: 5).

Rasulullah saw. pun sangat memperhatikan, menolong, membantu, dan mencintai kaum *mustadh’afin* dan fakir miskin. “Cintailah (kasihilah) fakir miskin umatku sebab sesungguhnya mereka akan memiliki negara kelak pada hari kiamat” (Riwayat al-Hasan). Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, “Carilah aku di antara orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan kemenangan karena orang-orang lemah kalian” (Riwayat Abû Dâwud).

Dalam sejarah awal Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam, tercatat kisah mengenai pengajian surah al-Mâ’ûn dan tafsir pengamalannya (Munir Mulkhan 2007, 193-94). Sudjak, salah seorang murid Kiai Dahlan menceritakan bahwa Kiai Dahlan dalam pengajian rutin subuh mengajarkan surah al-Mâ’ûn secara berulang-ulang selama beberapa hari tanpa diganti surah lainnya. Sehingga, lahirlah pertanyaan dari muridnya, mengapa materi pengajian tidak ditambah-tambah

dan hanya mengulang-ulang surah al-Mâ'ûn. Mendengar pertanyaan itu, Kiai balik bertanya kepada murid-muridnya, apakah mereka sudah benar-benar mengerti akan maksud surah al-Mâ'ûn. Para murid serentak menjawab, mereka bukan hanya sudah mengerti, tetapi sudah hafal. Kiai kemudian kembali bertanya, apakah arti ayat-ayat yang sudah dihafal tersebut sudah diamalkan. Para murid menjawab sambil bertanya, apanya yang diamalkan, bukankah surah al-Mâ'ûn sudah sering dibaca saat menjalankan shalat. Kiai menjawab, bukan itu maksudnya diamalkan. Tetapi, apakah yang dipahami itu sudah dipraktikkan dan dikerjakan. Maka setelah itu, Kiai memerintahkan para murid untuk mencari anak yatim, orang-orang miskin, pengemis dan gelandangan yang banyak terdapat di pasar, di stasiun kereta api dan di jalanan untuk dibawa pulang, dimandikan dengan sabun dan sikat gigi yang baik, diberi pakaian seperti yang biasa mereka pakai, diberi makan dan minum, serta tempat tidur yang layak. Inilah gerakan awal Muhammadiyah yang kelak melahirkan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), balai pengobatan, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo dan sebagainya.

Kita bisa mencermati gerakan yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan dan para muridnya di atas. Pada saat kaum duafa dan *mustadh'afin* percaya bahwa penyakit yang mereka derita adalah akibat "*telembut*" atau roh yang marah, Kiai Ahmad Dahlan justru mendirikan *Penolong Kesengsaraan Oemoem* (PKO)—yang kemudian menjadi rumah sakit—dengan pengobatan gratis. Ketika umat yang bodoh dan miskin memandang bangsa Belanda itu kafir, Kiai malah mendirikan balai pengobatan dengan dokter Belanda dan priyayi abangan tanpa bayaran. Sekolah yang dipandang umat sebagai tradisi orang kafir dan kristiani, dipilih Kiai sebagai media pembebasan umat dari kebodohan dan keterbelakangan. Kiai pun mendirikan sekolah pertama dengan menjadikan ruang tamu rumahnya sebagai kelas.

Apa yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan tidak bisa dilepaskan dari visinya tentang dunia dan pemahamannya mengenai al-Qur'an (Munir Mulkan 2007, 132). Visi Kiai Ahmad Dahlan "hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah"; "siapa menanam akan mengetam"; dan "pemimpin itu sedikit bicara banyak bekerja" merupakan visi hidup yang dalam dan sarat dengan nilai-nilai pemberdayaan. Visi itu kemudian melahirkan berbagai gagasan dan kerja sosial yang menuntut kesadaran Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan *Penolong Kesengsaraan Oemoem* (PKO), balai pengobatan, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, panti korban perang, sekolah, hingga penerbitan media cetak yang ditujukan sebagai upaya mengamalkan nilai Islam agar bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat yang tertindas (*mustadh'afin*), serta pencerdasan umat yang bodoh dan terbelakang.

Pemahaman atas nilai-nilai Islam dalam wujud pemihakan, pemberdayaan, dan kerja sosial terhadap kaum lemah dan tertindas menunjukkan bahwa Islam kaya akan nilai-nilai pemberdayaan. Dari hadis "kefakiran itu mengarah pada kekufuran" dapat dipahami bahwa misi dakwah Islam sebagai *rahmatan li al-'âlamîn* adalah membebaskan manusia dari segala bentuk kefakiran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, penindasan, dan ketidakberdayaan. Ini juga dibuktikan bahwa bagi seorang muslim, puncak tertinggi keimanannya bukanlah ketika dia sudah beriman dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah (Islam), melainkan muslim yang disebut "insan kamil" (manusia sempurna) adalah muslim yang telah sampai pada taraf *ihsân*, yaitu yang mampu memanasifestasikan asma dan sifat Allah sebagai kebaikan hidup yang bermanfaat bagi orang lain; *khayr al-nâs anfa'uhum li al-nâs* (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya).

Tak hanya itu, Islam juga menyediakan berbagai institusi keagamaan yang bisa memberi kontribusi dan sarana positif

untuk pemberdayaan masyarakat-zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Sebagai contoh pemberdayaan, pengelolaan zakat, infak, sedekah perlu digali lebih baik lagi dengan memperhatikan beberapa masalah yang selama ini melingkupinya, seperti: 1) belum ada kesadaran secara luas di kalangan umat Islam tentang pentingnya dana jangka panjang umat untuk membantu kaum *mustadh'afin*, 2) belum dimilikinya pengetahuan memadai tentang zakat-infak-sedekah, dan 3) belum andalnya pengelola (profesionalisme) dalam mengumpulkan dana umat dan mendistribusikannya (pemanfaatannya berdampak nyata dan berdaya guna secara luas).

Karena itu, perlu ada perbaikan kelembagaan dan manajerial programnya. Beberapa perbaikan tersebut dapat berupa: *Pertama*, lembaga harus membuat program-program yang khas dan unik serta bukan duplikasi atas yang telah dilakukan pemerintah atau lembaga lain, sehingga tidak tumpang tindih. Adanya program yang baik akan mendatangkan pendonor atau mereka yang peduli dengan pemberdayaan. *Kedua*, lembaga harus fokus dalam menjalankan program pemberdayaannya, misalnya untuk memanfaatkan kekuatan lokalitas. *Ketiga*, lembaga harus bekerja bersama masyarakat untuk membuat mereka bisa berupaya sendiri. Pemberdayaan itu bukannya hanya di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup upaya membantu dengan mengikutsertakan dan melibatkan langsung masyarakat sehingga mereka bisa berdaya, yakni bisa bekerja sendiri dan mandiri.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Moeslim. *Islam sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.

- Budi, Rahayu MG Ana. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Iskandarsyah Institute, 2006.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*. Terj. Hairus Salim HS dan Iman Bachagy. Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Trihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2004.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Lee, Robert D. *Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*. Bandung: Mizan, 2000.
- Mukhtar, Sarman. "Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat." *Prisma*, no. 1 (Januari 1997).
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Oka, I Nyoman et al. *CLAPP: Community-Led Assessment and Planning Process Menuju Kepemimpinan Rakyat*. Mitra Samya dan AusAID-ACCESS, 2005.
- Qutb, Muhammad. *Islam Agama Pembebas*. Terj. Funky Kusnaedi Timur. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Rekayasa Sosial: Revolusi atau Reformasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Sjahrir dan Korten. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Wahono, Francis. *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode Praksis dan Isinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.

Rifma Ghulam Dzaljad adalah dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Pedoman Penulisan Artikel *Tajdid*

TAJDID menerima tulisan dari para ahli dan peneliti kajian keislaman dan kemuhammadiyah. Tulisan berisi pembahasan ilmiah baik kajian pustaka maupun riset lapangan dengan ketentuan berikut:

- ❖ Tulisan harus terkait dengan studi keislaman dan/atau kemuhammadiyah.
- ❖ Tulisan diketik dengan 1,5 spasi pada kertas A4 sebanyak 15-30 halaman, serta disertai abstrak sejumlah 50-150 kata.
- ❖ Untuk "informasi bibliografis" (catatan kaki dan daftar pustaka) menggunakan *Turabian Style*, diperbolehkan menggunakan *ibid*, namun tidak untuk *Op.Cit.* dan *Loc.Cit.*
- ❖ Tulisan harus disertai dengan data diri: nama lengkap, gelar akademis, aktivitas atau jabatan (pendidikan/pekerjaan) terakhir.
- ❖ Tulisan harus disertai bukti pernyataan bebas plagiasi.
- ❖ Tulisan bisa diberikan langsung pada alamat redaksi atau lewat email: tajdid.aik@gmail.com.